

**INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

PERNYATAAN PENDAFTARAN PMHMETD INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ ATAU DIUBAH. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN EFEKTIF PENDAFTARAN YANG DIPEROLEH DARI OJK.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PTVISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi

Kantor Pusat

Mutiara Building Lantai 2
Jl. Mampang Prapatan No. 10
Jakarta 12790, Indonesia

Tel: (021) 797.5207, Fax: (021) 797.5208

E-mail: corporatesecretary@ptvti.co.id

Website: www.ptvti.co.id

**PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
TAHUN 2019 ("PMHMETD")**

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sejumlah 962.676.000 (sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 75,37% (tujuh puluh lima koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD ini. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 306 (tiga ratus enam) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp221,- (dua ratus dua puluh satu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPS").

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini adalah jumlah maksimum Saham Baru yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel Perseroan serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp212.751.396.000,- (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Saham Baru hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening bank Perseroan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Surat Pernyataan TBIG tanggal 02 Mei 2019, TBIG sebagai pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan 476.330.959 (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh sembilan) HMETD dan akan mengalihkan sejumlah 62.978.894 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) HMETD miliknya kepada PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd dan PT Sukses Prima Sakti.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"), HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 2 JULI 2019 SAMPAI DENGAN 8 JULI 2019. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 2 JULI 2019. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 8 JULI 2019 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT MENJADI MILIK PERSEROAN DAN AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE REKENING PERSEROAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DIAKHIRI DAN/ATAU TIDAK DIPERPANJANG PERJANJIAN PENYEWAAN DENGAN PELANGGAN.

PERSEROAN JUGA MEMILIKI RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA EFEK YANG DITAWARKAN YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO YANG DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH SEBESAR 75,37% (TUJUH PULUH LIMA KOMA TIGA TUJUH PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	30 April 2019
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	:	18 Juni 2019
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	:	28 Juni 2019
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	26 Juni 2019
- Pasar Tunai	:	28 Juni 2019
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	27 Juni 2019
- Pasar Tunai	:	1 Juli 2019
Tanggal Distribusi HMETD	:	1 Juli 2019
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	:	2 Juli 2019
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	2 – 8 Juli 2019
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	4 -10 Juli 2019
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Baru Tambahan	:	10 Juli 2019
Tanggal Penjatahan untuk Saham Baru Tambahan	:	11 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 Juli 2019

PMHMETD

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sejumlah 962.676.000 (sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 75,37% (tujuh lima koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD ini. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 306 (tiga ratus enam) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp221,- (dua ratus dua puluh satu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS").

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini adalah jumlah maksimum Saham Baru yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel Perseroan serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp212.751.396.000,- (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Saham Baru hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening bank Perseroan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Surat Pernyataan TBIG tanggal 02 Mei 2019, TBIG sebagai pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan 476.330.959 (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) HMETD dan akan mengalihkan sejumlah 62.978.894 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) HMETD miliknya kepada ACP, MSM, Scavino dan SPS.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 75,37% (tujuh puluh lima koma tiga tujuh persen).

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD			Sesudah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000		1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. TBIG	176.245.050	17.624.505.000	56,02	652.576.009	65.257.600.900	51,09
2. ACP	56.221.600	5.622.160.000	17,87	280.101.700	28.010.170.000	21,93
3. MSM	42.206.000	4.220.600.000	13,42	177.427.300	17.724.730.000	13,89
4. Scavino	14.135.900	1.413.590.000	4,49	63.964.200	6.396.420.000	5,01
5. LD	8.583.300	858.330.000	2,73	31.298.200	3.129.820.000	2,45
6. SPS	4.568.300	465.830.000	1,45	20.590.800	2.059.080.000	1,61
7. Masyarakat	12.639.850	1.263.985.000	4,02	51.317.791	5.131.779.100	4,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	314.600.000	31.460.000.000	100,00	1.277.276.000	127.727.600.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.185.400.000	118.540.000.000		222.724.000	22.272.400.000	

Apabila publik (selain Scavino, SPS, dan LD) tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD			Sesudah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000		1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. TBIG	176.245.050	17.624.505.000	56,02	652.576.009	65.257.600.900	52,69
2. ACP	56.221.600	5.622.160.000	17,87	280.101.700	28.010.170.000	22,61
3. MSM	42.206.000	4.220.600.000	13,42	177.427.300	17.724.730.000	14,32
4. Scavino	14.135.900	1.413.590.000	4,49	63.964.200	6.396.420.000	5,16
5. LD	8.583.300	858.330.000	2,73	31.298.200	3.129.820.000	2,53
6. SPS	4.568.300	465.830.000	1,45	20.590.800	2.059.080.000	1,66
7. Masyarakat	12.639.850	1.263.985.000	4,02	12.639.850	1.263.985.000	1,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	314.600.000	31.460.000.000	100,00	1.238.598.059	123.859.805.900	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.185.400.000	118.540.000.000		261.401.941	26.140.194.100	

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

- sekitar Rp 138,5 miliar akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal di Entitas Anak yaitu PKP, di mana dana hasil penyertaan modal tersebut akan digunakan PKP untuk:
 - sekitar Rp103,5 miliar untuk keperluan belanja modal; dan
 - sekitar Rp35 miliar untuk pelunasan utang bank, berdasarkan: Perjanjian Kredit No. 193/BIP-ABM/KI-B/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 antara PKP dan PT Bank Ina Perdana
- sekitar Rp63,5 miliar akan digunakan untuk pelunasan hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 8 April 2016 sebagaimana diubah tertanggal 13 Desember 2018; dan
- sisanya akan digunakan untuk modal kerja.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasi berdasarkan laporan No. 00618/2.1051/AU.1/03/1029-3/1/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp145.164 juta, terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp48.022 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp97.142 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	7.752
Pihak berelasi	10.176
Pendapatan diterima di muka	18.505
Utang pajak	1.158
Beban masih harus dibayar	1.118
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9.314
Total Liabilitas Jangka Pendek	48.022
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	63.476
Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	31.710
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.956
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	97.142
Total Liabilitas	145.164

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN PMHMETD I, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA YANG SEWAJARNYA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK ADA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ATAU IKATAN-IKATAN LAIN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian berdasarkan laporan No. 00618/2.1051/AU.1/03/1029-3/1/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material berdasarkan laporan No. KNMT&R-C2-14.03.2018/02 tanggal 14 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	2.638	5.683
Piutang usaha - pihak ketiga	14.112	2.905

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	127	76
Pihak berelasi	1.200	1.200
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka	7.541	9.121
Uang muka dan beban dibayar dimuka	4.830	4.021
Tagihan pajak penghasilan	537	1.489
Total Aset Lancar	30.985	24.495
ASET TIDAK LANCAR		
Bagian aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Uang muka dan beban dibayar dimuka	22.907	21.932
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.249.798.418 pada tahun 2018. Rp21.442.504.902 pada tahun 2017 dan Rp20.421.965.401 pada tahun 2016	184.835	186.603
Aset pajak tangguhan	489	222
Total Aset Tidak Lancar	208.231	208.757
TOTAL ASET	239.216	233.252
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	7.752	-
Pihak berelasi	10.176	-
Pendapatan diterima dimuka	18.505	5.842
Utang pajak	1.158	495
Beban masih harus dibayar	1.118	408
Utang pihak berelasi	-	59.644
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9.314	5.244
Total Liabilitas Jangka Pendek	48.022	71.633
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi	63.476	-
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun	31.710	26.051
Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan	1.956	1.410
Liabilitas pajak tangguhan	-	12.407
Total Liabilitas Jangka Panjang	97.142	39.868
TOTAL LIABILITAS	145.164	111.501
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada		
Perseroan		
Modal saham	31.460	31.460
Tambah modal disetor - neto	26.752	26.752
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	11.898	19.930
Telah ditentukan penggunaannya	5.334	5.334
Cadangan revaluasi aset tetap	18.607	38.274
Total ekuitas yang diatribusikan kepada Perseroan	94.051	121.750
Kepentingan Nonpengendali	1	1
TOTAL EKUITAS	94.052	121.751
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	239.216	233.252

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	34.614	26.755
Beban Pokok Pendapatan	12.489	9.072
Laba Kotor	22.125	17.683
Beban Usaha	14.412	14.866

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Laba Usaha	7.713	2.817
Penghasilan (Beban) Lain-Lain		
Pendapatan bunga	76	277
Beban bunga	(10.365)	(3.157)
Rugi penghapusan aset tetap	(4.528)	-
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	(50)	(2)
Lain-lain - neto	(5)	(9)
Beban lain-lain	(14.872)	(2.891)
Rugi sebelum beban pajak penghasilan	(7.160)	(74)
Beban pajak penghasilan	(922)	(825)
Rugi neto tahun berjalan	(8.082)	(899)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya		
Surplus revaluasi aset tetap	(32.425)	13.851
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	66	380
Efek pajak terkait	12.741	(3.558)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(19.618)	10.673
Laba (Rugi) Komprehensif	(27.700)	9.774
Rugi neto yang dapat didistribusikan kepada :		
Perseroan	(8.082)	(899)
Kepentingan Nonpengendali	-	-
Total rugi neto tahun berjalan	(8.082)	(899)
Laba (Rugi) komprehensif yang dapat didistribusikan kepada :		
Perseroan	(27.700)	9.774
Kepentingan Nonpengendali	-	-
Total laba (rugi) komprehensif	(27.700)	9.774
Rugi neto per saham yang dapat didistribusikan kepada Perseroan*	(25,69)	(2,86)

*dalam nilai penuh

Rasio-rasio Pertumbuhan, Marjin Profitabilitas dan Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (dalam %)		
Pendapatan	29,37%	177,26%
Beban Pokok Pendapatan	37,67%	177,73%
Laba/(Rugi) Usaha	173,80%	-144,87%
Laba/(Rugi) Periode/Tahun Berjalan	799,00%	-30,73%
Jumlah Aset	2,56%	24,75%
Jumlah Liabilitas	30,19%	48,61%
Jumlah Ekuitas	-22,75%	8,75%
Marjin Profitabilitas (dalam %)		
Laba Usaha/Pendapatan	22,28%	10,53%
Laba (Periode)Tahun Berjalan/Pendapatan	-23,35%	-3,36%
Laba Usaha/Jumlah Aset	3,22%	1,21%
Laba (Periode)Tahun Berjalan/Jumlah Aset	-3,38%	-0,39%
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas	8,20%	2,31%
Laba (Periode)Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	-8,59%	-0,74%
Rasio Keuangan		
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,54x	0,92x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,61x	0,48x
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,65x	0,34x

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, yang juga disajikan dalam Prospektus ini.

Menurut pendapat oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang seluruhnya mendapat Opini Tanpa Modifikasi dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta hasil usaha dan arus kas yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk sites menara telekomunikasi). Per 31 Desember 2018, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp31.410 juta dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh sites telekomunikasi adalah sekitar 7,1 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 48,78% dan 39,30% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berasal dari: PT XL Axiata Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara *build-to-suit*. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan site menara dan pembangunan site menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2018, Perseroan menambah 28 sites menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi sites menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi shelter. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp40.542 juta dan Rp42.170 juta.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Perbedaan dari tarif pajak efektif Perseroan dengan tarif pajak perusahaan maksimum terutama disebabkan oleh perbedaan perlakuan penyusutan aset tetap dalam perhitungan pajak penghasilan Perseroan. Untuk tujuan perpajakan, Perseroan mendepresiasi aset tetap menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat dari aset terkait. Untuk tujuan laporan keuangan, Perseroan mendepresiasi aset tetap dan perubahan nilai wajar aset tetap diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas

pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan imbalan kerja karyawan. Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian sites menara. Sebelum memulai konstruksi sites menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, IMB atau IMBM serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio sites.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan sites telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia tumbuh sebesar 5,02%, 5,07% dan 5,17% per tahun masing-masing di tahun 2016, 2017 dan 2018 menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara tingkat inflasi tercatat sebesar sebesar 3,02%, 3,61% dan 3,13% per tahun masing-masing di tahun 2016, 2017 dan 2018 menurut data Badan Pusat Statistik. Teknologi baru, seperti 3G dan 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

2. Kebijakan Akuntansi Penting

Keterangan mengenai kebijakan akuntansi Perseroan dapat dilihat pada laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 (dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan sebagai komparatif), sebagaimana tercantum di situs Bursa Efek Indonesia.

3. Analisa Keuangan

Data laporan posisi keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Aset Lancar	30.985	24.495
Aset Tidak Lancar	208.231	208.757
Total Aset	239.216	233.252
Liabilitas Jangka Pendek	48.022	71.633
Liabilitas Jangka Panjang	97.142	39.868
Total Liabilitas	145.164	111.501
Total Ekuitas	94.052	121.751

Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp6.489 juta atau 26,49% yaitu dari Rp24.495 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp30.985 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan piutang usaha-pihak ketiga sebesar Rp11.206 juta. Per 31 Desember 2018, sebesar 85,72% dari jumlah piutang usaha belum jatuh tempo.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp526 juta atau 0,25% yaitu dari Rp208.756 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp208.231 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai wajar aset tetap berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen.

Total Aset

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.964 juta atau 2,56% yaitu dari Rp233.252 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp239.216 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan aset lancar sebesar Rp6.489 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.611 juta atau 32,96% yaitu dari Rp71.633 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp48.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi sebesar Rp59.644 juta dari liabilitas jangka pendek ke liabilitas jangka panjang.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp57.274 juta atau 143,66% yaitu dari Rp39.867 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp97.142 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi sebesar Rp63.476 juta.

Total Liabilitas

Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp33.663 juta atau 30,19% yaitu dari Rp111.501 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp145.164 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain sebesar Rp17.928 juta dan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp12.662 juta.

Ekuitas

Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp27.699 juta atau 22,75% yaitu dari Rp121.751 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp94.052 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan cadangan revaluasi aset tetap berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sebesar Rp19.667 juta dan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp8.082 juta.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	34.614	26.755
Beban Pokok Pendapatan	12.489	9.072
Laba Usaha	7.713	2.817
Rugi neto tahun berjalan	(8.082)	(899)

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.859 juta atau 29,37% yaitu dari Rp26.755 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp34.614 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah menara yang disewa PT XL Axiata Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, yang merupakan penyewa utama menara Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.417 juta atau 37,67% yaitu dari Rp9.072 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp12.489 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan dari amortisasi sewa lahan dan biaya perawatan sites.

Laba Usaha

Laba Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Laba Usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.895 juta atau 173,77% yaitu dari Rp2.817 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp7.713 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini seiring dengan peningkatan pendapatan seiring bertambahnya jumlah menara yang disewa.

Total Laba/(Rugi) Neto Tahun Berjalan

Perbandingan Total Laba/(Rugi) Neto Tahun Berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Total rugi neto tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.183 juta atau 798,64% yaitu dari negatif Rp899 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi negatif Rp8.082 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga sebesar Rp7.207 juta dan rugi penghapusan aset tetap sebesar Rp4.528 juta.

Analisis Arus kas

Penggunaan kas Perseroan secara historis banyak digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan, belanja modal dan pembayaran utang bank. Sumber likuiditas ini didapatkan dari operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Selain itu Perseroan memperoleh likuiditasnya dari penerimaan utang pihak berelasi, serta penerimaan pinjaman dari bank.

Laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	17.760	(5.481)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(40.534)	(37.407)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	19.730	31.321

Arus kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp23.241 juta atau 424,03% yaitu dari negatif Rp5.481 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp17.760 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp10.515 juta dan penurunan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp9.672 juta.

Arus kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp3.127 juta atau 8,36% yaitu dari negatif Rp37.407 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi negatif Rp40.534 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dalam perolehan aset tetap dalam penyelesaian.

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp11.591 juta atau 37,01% yaitu dari Rp31.321 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp19.730 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan dalam pembayaran utang bank sebesar Rp6.860 juta dan penurunan dari penerimaan dari utang bank sebesar Rp14.705 juta.

Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Rasio Lancar ⁽¹⁾	0,65x	0,34x
Rasio Total Liabilitas / Total Aset ⁽²⁾	0,61x	0,48x
Rasio Total Liabilitas / Total Ekuitas ⁽³⁾	1,54x	0,92x

Keterangan:

1. Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
2. Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode terkait.
3. Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi Liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio Lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan dari 0,34x menjadi 0,65x. Peningkatan rasio lancar ini disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi dari jangka pendek menjadi jangka panjang sesuai dengan amandemen perjanjian hutang.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (*Debt to Asset Ratio*) atau rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*).

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan dari 0,48x menjadi 0,61x. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas, khususnya utang pihak berelasi, yang melebihi peningkatan jumlah aset.

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan dari 0,92x menjadi 1,54x. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah liabilitas

yang cukup besar melalui utang pihak berelasi dibandingkan dengan penurunan pada jumlah ekuitas, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada cadangan revaluasi aset tetap.

Rentabilitas

Rentabilitas diukur dengan menerapkan beberapa rasio keuangan seperti marjin laba bersih, imbal hasil ekuitas, dan imbal hasil aset. Rasio keuangan ini menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bagi Perseroan.

- Marjin laba bersih adalah perbandingan antara laba/(rugi) komprehensif dan pendapatan Perseroan;
- Imbal hasil aset menjelaskan kemampuan rata-rata nilai aset Perseroan untuk menghasilkan laba/(rugi) bersih tahun berjalan; dan
- Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang dihitung dengan membandingkan laba bersih tahun berjalan terhadap ekuitas.

Tabel dibawah ini menyajikan marjin laba bersih, rata-rata imbal hasil aset dan rata-rata imbal hasil ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Marjin laba bersih	-80,02%	36,53%
Rata-rata imbal hasil aset	-11,58%	4,19%
Rata-rata imbal hasil ekuitas	-29,45%	8,03%

4. Manajemen Risiko

Dalam aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perseroan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko pasar, kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perseroan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

1. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga. Risiko pasar yang signifikan untuk Perseroan adalah sebagai berikut:

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank dan setara kas dan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

2. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup dihadapkan pada risiko kredit dari aktivitas pendanaan. Risiko kredit terutama berasal dari bank dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Risiko kredit dikelola sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Grup yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit. Batasan kredit ditentukan berdasarkan kriteria penilaian secara internal.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dalam hal Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya

dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko diakhiri dan/atau tidak diperpanjang perjanjian penyewaan dengan pelanggan.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko ketergantungan pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan
2. Risiko sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi
3. Risiko bahwa Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara
4. Risiko Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan.
5. Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah
6. Risiko dari bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga dimana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai
7. Risiko dari perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Perseroan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko terkait kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan
2. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO INVESTASI PADA SAHAM HMETD PERSEROAN

1. Risiko terkait harga saham dan kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD
3. Risiko terkait harga pelaksanaan lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham
4. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
5. Risiko terkait fluktuasi harga saham

Rincian mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu 3 Mei 2019 atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Pendirian No. 136 tanggal 8 November 1995, yang dibuat dihadapan Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham

berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996 dan didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 491/1996 tanggal 2 April 1996. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 89 tanggal 26 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Golden Retailindo. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C08089-HT.01.04.TH.2002 tanggal 10 Mei 2002. Dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 147 tanggal 14 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Golden Retailindo Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03318.AH.01.02.TH.2010 tanggal 21 Januari 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Golden Retailindo Tbk No. 120 tanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011039.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 10 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 59, Tambahan No. 12851 tanggal 26 Juli 2016.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk No. 171 tanggal 30 April 2019, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU—0023911.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal tanggal 6 Mei 2019 (“Akta No. 171/2019”).

Berdasarkan Akta No. 171/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah 800.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp100 menjadi 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp100 oleh karena itu mengubah Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. TBIG	176.245.050	17.624.505.000	56,02
2. ACP	56.221.600	5.622.160.000	17,87
3. MSM	42.206.000	4.220.600.000	13,42
4. Scavino*	14.135.900	1.413.590.000	4,49
5. SPS	4.568.300	465.830.000	1,45
6. LD	8.583.300	858.330.000	2,73
7. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	12.639.850	1.263.985.000	4,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	314.600.000	31.460.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.185.400.000	118.540.000.000	

* PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pemegang saham atas 14.135.900 saham milik Scavino yang disebabkan oleh adanya transaksi REPO antara Scavino Ventures Ltd dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015.

C. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 170 tertanggal 30 April 2019, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230891 tanggal 6 Mei 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0071694.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 6 Mei 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Helmy Yusman Santoso
Komisaris Independen : Theignatius Agus Salim

Direksi:

Direktur Utama dan Independen : Paulus Ridwan Purawinata
Direktur : Riady Nata
Direktur : Gilang Pramono Seto
Direktur : Alexandra Yota Dinarwanti

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, masing-masing dengan Opini Tanpa Modifikasi.

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perseroan			
Modal saham	31.460	31.460	31.460
Tambahan modal disetor - neto	26.752	26.752	26.726
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	11.898	19.930	20.545
Telah ditentukan penggunaannya	5.334	5.334	5.334
Cadangan revaluasi aset tetap	18.607	38.274	27.886
Total ekuitas yang diatribusikan kepada Perseroan	94.051	121.750	111.950
Kepentingan Nonpengendali	1	1	1
Jumlah Ekuitas	94.052	121.751	111.951

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 31 Desember 2018 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp221,- (dua ratus dua puluh satu Rupiah) per saham.

Keterangan	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2018 sebelum PMHMETD	(dalam jutaan Rupiah)	
		Total 962.676.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam jumlah penuh) dan harga HMETD Rp221 per saham	Proforma Ekuitas per 31 Desember 2018 setelah PMHMETD
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perseroan			
Modal saham	31.460	96.267	127.727
Tambahan modal disetor - neto	26.752	116.484	143.236
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	11.898	-	11.898
Telah ditentukan penggunaannya	5.334	-	5.334
Cadangan revaluasi aset tetap	18.607	-	18.607
Total ekuitas yang diatribusikan kepada Perseroan	94.051	221.751	306.802
Kepentingan Nonpengendali	1		1
Jumlah Ekuitas	94.052		306.803

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sebesar sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan, tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain: (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan Pemegang Saham pada RUPS.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	:	Jimmy Tanal, SH., MKn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD, Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai BAE sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli Saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham lama berhak atas 306 (tiga ratus enam) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp221,- (dua ratus dua puluh satu Rupiah) setiap saham.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah (*rounded down*) dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah :

- Pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat

dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha, baik Indonesia atau asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksananya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 28 Juni 2019.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 29 Juni 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 28 Juni 2019 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi Pemegang Saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas *C-BEST*;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan

menggunakan fasilitas *C-BEST*. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (Pemegang Saham lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 8 Juli 2019.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui *C-BEST* yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem *C-BEST*);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2019 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan oleh Pemegang Saham Perseroan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan;
- c. Jumlah Saham Baru yang akan dijatahkan adalah sisa Saham Baru yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank: Mandiri
Cabang: Plaza Dua Mutiara
No. Rekening: 1020006754268
Atas Nama: PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 16 Juli 2019.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil Saham dan pengembalian uang untuk pemesanan Saham Baru tambahan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham Baru

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 15 Juli 2019. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank di mana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 10 Juli 2019. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 11 Juli 2019. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum Pemegang Saham) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 28 Juni 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 11 Juli 2019 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120

Apabila sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.